

ABSTRAK

Pembubaran FPI pada 30 Desember 2020 memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pendekatan represif negara dan dampaknya terhadap stabilitas demokrasi Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji implikasi jangka panjang dari pembubaran FPI dan respons masyarakat terhadapnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur, analisis media, dan wawancara terbatas terhadap tokoh masyarakat serta pengamat politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran FPI mendorong reorganisasi dalam bentuk Neo-FPI yang mengadopsi strategi lebih lunak namun tetap mempertahankan ideologi dasar. Polarisasi masyarakat pun menguat antara pihak yang mendukung pembubaran sebagai upaya stabilisasi keamanan dan pihak yang menilainya sebagai bentuk represi politik. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya bersifat koersif, tetapi juga berbasis dialog dan moderasi guna menjaga kohesi sosial dan memperkuat stabilitas demokrasi secara berkelanjutan. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian tentang hubungan antara gerakan sosial, respons negara, dan stabilitas demokrasi di Indonesia pascareformasi. Selain itu, penelitian ini turut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan sipil agar demokrasi tidak kehilangan legitimasi di mata publik.

Kata Kunci: **Represi Negara, Stabilitas Demokrasi, Gerakan Sosial Islam**

ABSTRACT

The dissolution of the Islamic Defenders Front (FPI) on December 30, 2020, has raised critical questions regarding the effectiveness of the state's repressive approach and its broader implications for democratic stability in Indonesia. This study aims to examine the long-term consequences of FPI's disbandment and the public's response to it. Employing a qualitative methodology, the research draws upon literature reviews, media analysis, and limited interviews with community figures and political observers. The findings reveal that the dissolution prompted a process of reorganization through the emergence of Neo-FPI, an entity that adopted a softer public strategy focused on humanitarian and religious outreach while maintaining its core ideological framework. Public reactions remain deeply polarized—supporters view the move as a legitimate act of law enforcement to maintain national stability, while critics perceive it as political repression and a violation of associational freedoms. The study highlights the necessity of state policies that go beyond coercion, advocating for inclusive strategies rooted in dialogue and religious moderation to preserve social cohesion and reinforce democratic resilience. Theoretically, this research contributes to the discourse on social movements, state response, and democratic stability in post-reform Indonesia. Moreover, it underscores the importance of balancing law enforcement with the protection of civil liberties to prevent the erosion of democratic legitimacy in the eyes of the public.

Keywords: *State Repression, Democratic Stability, Islamic Social Movements*